

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kewajiban pemerintah dan badan-badan yang terkait dengannya, seperti Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi Masyarakat terutama yang tersebar di desa-desa maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terutama bagi BUMDes yang sudah terbentuk namun belum memiliki daya saing yang memadai untuk berkembang dan *survive* atau bertahan lama.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga Masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desaasumsi tersebut diperkuat melalui PP No.11 tahun 2021 pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

Sementara itu, Desa merupakan sistem sosial yang sangat kuat di Indonesia karena merupakan kesatuan Masyarakat hukum. Hal ini memposisikan desa menjadi landasan yang pokok bagi terciptanya sistem politik, ekonomi, budaya, dan juga badan pertahanan yang stabil dan dinamis. Pada sebuah Desa diharapkan adanya suatu usaha yang akan menggerakkan perekonomian Masyarakat ke depan dan merangsangnya, sehingga masyarakat di desa dapat mencapai tujuan ekonominya, dengan cara mengelola sepenuhnya aset ekonomi desa (Fitriani, 2022).

Akuntabilitas BUMDes dapat berbentuk akuntabilitas *financial* dan administratif. Bentuk akuntabilitas *financial* seperti menerbitkan laporan penyerapan anggaran dan laporan tahunan Masyarakat. Sedangkan bentuk akuntabilitas administratif adalah melakukan pelaporan kegiatan tahunan kepada atasan (Rahayu dan Juwono, 2019:273). Hal ini juga ditegaskan dalam Permendesa PD TT No.4/2015 pasal 12 bahwa pelaksanaan operasional BUMDes setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan kegiatan unit-unit BUMDes kepada Masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Hal tersebut berlaku bagi tiap-tiap BUMDes yang ada di Indonesia, seperti BUMDes Lakmaras yang ada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha BUMDes Lakmaras harus didukung dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Karena itu, Aktivitas bisnis dan ketentuan yang diperoleh BUMDes Lakmaras harus

disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik sehingga akan berpengaruh langsung dalam pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan (Fitriya, 2022).

Pengelolaan keuangan menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi 4 prinsip yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam anggaran. Sejalan dengan prinsip Peraturan Menteri dalam Negeri, pengelolaan BUMDes didasarkan pada 6 prinsip yaitu korporatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Kesejahteraan masyarakat Desa Lakmaras juga dapat meningkat ketika BUMDes dioptimalisasi dan diiringi dengan penguatan pengelolaan keuangan. Penguatan pengelolaan keuangan dilakukan dengan penerapan empat tahap pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dengan baik serta dilakukan pengawasan yang memadai. Dasar yang digunakan dalam pengelolaan keuangan atau laporan keuangan BUMDes Lakmaras adalah dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Kepmendes PDTT No 136 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan BUMDes terdiri dari 5 bagian utama yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang dapat membantu Unit BUMDes Lakmaras agar menjadi lebih transparan, efisien, serta akuntabel dari segi pelaporan keuangan.

Pengelolaan keuangan (*money management*), pada umumnya merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan (*financial welfare*). (Ida *et al.*, 2010). Oleh karena itu berdasarkan asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam mencapai kesejahteraan dibutuhkan pengelolaan keuangan berbasis standar yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihabur-haburkan.

Purba *et al.*, (2021:14) mengasumsikan bahwa pengelolaan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab setiap individu terhadap keuangannya karena pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Pengelolaan keuangan dapat juga menunjukkan bahwa perilaku pengelola keuangan tidak berindikasi pada masalah jangka panjang yang serius (Joo *et al.*, 2009).

Pengelolaan keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manager Perusahaan. terdapat 4 kerangka dasar pengelolaan yang dua diantaranya yaitu pencatatan dan pelaporan (Kuswadi, 2005). Tujuan Pencatatan dan Pelaporan yaitu Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen unit usaha, membantu dalam pengambilan

keputusan keuangan yang efektif, memenuhi persyaratan pelaporan keuangan kepada pihak berkepentingan seperti pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan unit usaha.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan usaha dianggap penting karena dengan melakukan pengelolaan keuangan pelaku usaha akan (1) Mengetahui informasi tentang posisi keuangan, (2) menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, (3) mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya, (4) manfaat lain seperti strategi penetapan harga dan penyusunan anggaran kas (Abbdullah, 2011).

Unit Usaha Kopi Lakmaras menjadi satu-satunya unit usaha yang dikelola langsung oleh BUMDes Lakmaras Kabupaten Belu dimana daerah ini berbatasan langsung dengan Timor Leste dan di pandang cukup potensial. Kabupaten Belu banyak menghasilkan komoditas-komoditas yang juga sangat beragam baik itu dari sektor pertanian, *furniture*, kuliner, tenun ikat dan anyaman. Seperti Desa Lakmaras dari sektor pertanian Kabupaten Belu yang menjadi daerah pengelolaan kopi, bahkan menjadi salah satu komoditas di kabupaten ini. Kabupaten Belu sendiri dijuluki sebagai wilayah penghasil kopi, karena memiliki topografi wilayah berbukit tinggi hingga pegunungan serta kemiringan lereng berkisar 20-40 persen pada wilayah kecamatan lamaknen selatan khususnya desa Lakmaras, sehinga cocok untuk melakukan budidaya kopi.

Asumsi diatas diperkuat dengan hasil observasi awal dengan manager Unit Usaha kopi Lakmaras yang menyatakan bahwa keuntungan geografis desa

Lakmaras sebagai faktor sentral produksi kopi di Kabupaten Belu. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopi dan memiliki Jenis kopi yang menjadi pion oleh Unit Usaha BUMDes Lakmaras yakni kopi Arabika. Unit Usaha kopi Lakmaras sudah diproduksi sejak Tahun 2020 hingga sekarang. Usaha yang dinamakan Kopi Arabika Timor ini sudah diedarkan hingga di pasaran Pulau Jawa.

Sesuai dengan observasi awal diatas dapat diasumsikan bahwa pengelolaan usaha yang dimiliki BUMDes yakni unit Unit Usaha Kopi Lakmaras sudah sangat baik, hal ini ditandai usaha distribusi BUMDes Lakmaras yang mampu memasarkan produknya hingga pada pasaran pulau Jawa dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Namun, antusias dari pelaku Unit Usaha Kopi Lakmaras untuk senantiasa berusaha mengembangkan usahanya, tidak diiringi dengan pengelolaan keuangan yang efisien. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai posisi keuangan di setiap bulan dan tahunnya tidak diketahui pasti oleh pelaku Usaha Kopi Lakmaras seperti halnya pendapatan yang diperoleh pelaku usaha Kopi Lakmaras, sehingga menjadi masalah yang serius bagi keberlangsungan Usaha tersebut. Berikut adalah bentuk Laporan keuangan yang dimiliki oleh Unit Usaha Kopi Lakmaras.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Usaha Kopi Lakmaras bulan Januari 2022

No	Hari/tanggal	Uraian	
1	Selasa,05/01/2022	Beli bensin 3 Liter	Rp30.000,00
2	Selasa,06/01.2022	Penjualan bubuk 500 gr 14 bks (piutang)	Rp980.000,00 (Piutang)
3	Selasa,13/01/2022	isi ulang tabung gas 12kg	Rp235.000,00
		Ongkos Mobil	Rp15.000,00
4	Kamis,20/01/2022	penjualan bubuk kopi 250gr 2 bks (piutang)	Rp70.000,00
5	Jumat,20/01/2022	pengiriman kopi 3kg kirim ke kupang	Rp240.000,00
		penjualan kopi bubuk 250gr 17 bks	Rp295.000,00
		transportasi	Rp150.000,00
6	Sabtu,22/01/2022	Bon bensin 3Liter	Rp30.000,00
		pembelian kopi mentah 22kg/24.000	Rp528.000,00
		penjualan kopi bubuk 250gr 50 bks (tf rek)	Rp1.750.000,00
		penjualan kopi bubuk 250gr 34 bks	Rp1.120.000,00
		(2 bks untuk tes) di JM	
7	selasa,25/02/2022	bon bensin 5 botol	Rp50.000,00

Berdasarkan tabel 1.1. diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras masih belum mampu menyajikan tata kelola keuangan sesuai dengan Kepmendes PD TT No 136 Tahun 2022, dimana Pengelolaan keuangan yang dibuat saat ini masih menggunakan basis sederhana yang hanya berisikan hari/tanggal, uraian, dan saldo. Maka dari itu, hal ini dapat menimbulkan kesalahan atau bahkan ketidakpastian dan keakuratan informasi keuangan.

Adapun permasalahan yang berdasarkan hasil wawancara terkait pengelolaan keuangan yakni disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan akuntansi pada pelaku Unit Usaha Kopi

Lakmaras, serta kecenderungan lebih memilih mengesampingkan edukasi tentang pengelolaan keuangan. Padahal kenyataannya, dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan berdampak baik pula terhadap usaha yang dijalankan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Evaluasi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, Kabupaten Belu”** untuk menganalisis capaian pengelolaan keuangan pada Unit Usaha Kopi Lakmaras dan kendala apa saja yang dihadapi pelaku Unit Usaha BUMDes sehingga tidak melakukan pengelolaan keuangan secara baik di Unit Usaha Kopi Lakmaras di Kabupaten Belu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras di Kabupaten Belu?
2. Apakah pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras telah sesuai dengan Kepmendes PDTT No 136 Tahun 2022?
3. Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan berbasis PDTT No 136 Tahun 2022 pada Unit Usaha kopi lakmaras?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras Lakmaras di Kabupaten Belu.
2. Untuk Mengetahui pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras jika dikonversikan sesuai Kepmendes PDTT No 136 Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pelaku dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan sistematis pada Unit Usaha Kopi Lakmaras di Kabupaten Belu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu

1. Bagi Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras Kabupaten Belu.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pada Unit Usaha BUMdes Kopi lakmaras Kabupaten Belu.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes Kopi Lakmaras, yang dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengejaran di masa depan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan inspirasi serta menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sejenis.